

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rancangan Anggaran 2020 Jakarta Dinilai Penuh Kejanggalan

Anggota DPRD dan Gubernur Anies mempersoalkan pelbagai usulan mata anggaran yang nilainya tidak wajar.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terus menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang mereka anggap penuh kejanggalan.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan pelbagai kejanggalan tersebut memperlambat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Padahal DPRD dan pemerintah Jakarta hanya memiliki waktu hingga akhir November 2019.

“Beberapa usulan (anggaran janggal) yang saya paparkan itu belum semua. Masih banyak temuan aneh. Anggarannya besar tapi tak bisa diterima akal sehat,” kata William di gedung DPRD Jakarta, kemarin.

Pemerintah DKI Jakarta menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2020 ke DPRD Jakarta pada Juli lalu. Namun pembahasan Rancangan APBD 2020 baru dimulai setelah tersusunnya alat kelengkapan DPRD 2019-2024 pada pekan lalu.

Awal pekan ini, Fraksi PSI mempersoalkan rincian Rancangan APBD 2020 yang janggal ke publik. William, misalnya, membeberkan anggaran pengadaan lem sebesar Rp 82,8 miliar dan pengadaan pulpen Rp 123,8 miliar di Dinas Pendidikan. Selain

itu, diampersoalkan anggaran pengadaan ribuan unit komputer dengan harga satuan Rp 15 juta.

William juga mempersoalkan anggaran pengadaan *storage* dan server senilai Rp 65,9 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta. “Saya pernah ke Jakarta Smart City, rasanya tak memerlukan tambahan *storage* yang harga dan besarnya sampai Rp 12 miliar per buah,” ujar William.

Adapun Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco, mempersoalkan respons pemerintah DKI Jakarta setelah Dewan mencuatkan anggaran-anggaran janggal. Pemerintah DKI Jakarta mencabut dokumen Rancangan APBD 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. “Pemerintah DKI seharusnya membuktikan janjinya untuk membahas anggaran secara terbuka kepada masyarakat,” ujar dia.

Basri menilai pemerintah DKI melangkah mundur justru ketika DPRD terbuka dengan membiarkan masyarakat mengakses seluruh rincian gaji anggota Dewan. “Ingat, ini zaman transparansi,” ujar dia.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan anggaran promosi wisata Rp 5 miliar untuk membayar lima *influencer* luar negeri di media sosial. Anggota Dewan juga mempersoalkan penambahan anggaran pembangunan jalur sepeda Dinas Perhubungan yang mencantumkan pengadaan jalur sepeda hingga Rp 73 miliar.

Kemarin, sejumlah pe-

jabat DKI Jakarta menyampaikan penjelasan kepada media tentang anggaran yang dinilai janggal. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro, mengatakan anggaran menyewa *influencer* di media sosial telah dihapus. Promosi wisata selanjutnya akan dilakukan melalui akun media sosial milik pemerintah DKI.

Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Lupito, juga memaparkan tambahan usulan anggaran sekitar Rp 69 miliar untuk membangun jalur sepeda. Menurut dia, anggaran tersebut termasuk untuk membangun pembatas jalur sepeda, marka jalur sistem ganjil-genap, dan marka di sekitar jalur khusus bus Transjakarta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengatakan anggaran lem dan pulpen merupakan pengajuan dari setiap suku dinas pendidikan. Dia mengklaim anggaran tersebut usulan kepada Dinas Pendidikan. Menurut dia, Dinas Pendidikan masih menyisir pengajuan anggaran disahkan dalam Rancangan APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD.

Sedangkan anggaran komputer untuk ujian *online*, menurut Syaefuloh, akan ditunda karena masih bisa diterapkan sistem penggunaan komputer Dinas Pendidikan oleh sekolah secara bergantian. “Komputer di SMA akan dipinjamkan ke SMP (ujiannya beda waktu). Kami sudah siapkan revisinya dan disampaikan ke DPRD,” kata Syaefuloh.

Sebelumnya, ketika memberi pengarahan kepada para pejabat pemerintah DKI pada 23 Oktober lalu, Gubernur Anies Baswedan juga mempersoalkan mata anggaran yang janggal dalam Rancangan APBD 2020. Video rekaman pengarahan berdurasi lebih dari satu jam itu diunggah di YouTube.

Dalam rekaman tersebut, Anies membeberkan dan mempertanyakan sejumlah contoh mata anggaran yang dia anggap tidak wajar. Termasuk di antaranya mata anggaran yang dipersoalkan anggota Dewan. Anies berkali-kali meminta para pejabat DKI menyisir dan menghapus usulan anggaran seperti itu. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang diselip-selipkan,” kata Anies dalam rekaman video itu.

● IMAM HAMDY | TAUFIQ SIDDIQ | LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rancangan Anggaran 2020 Jakarta Dinilai Penuh Kejanggalan

Anggaran Tak Masuk Akal

GUBERNUR Anies Baswedan mengumpulkan pejabat-pejabat pemerintah di DKI Jakarta pada 23 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, Anies menemukan berbagai anggaran yang dinilai tidak masuk akal.

Berikut ini contoh-contoh anggaran yang disebutkan Anies:

- Anggaran belanja alat tulis yang tahun ini sebesar Rp 349 miliar pada 2020 dianggarkan Rp 1,6 triliun
- Anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur pada 2019 diajukan sebesar Rp 35 miliar, sedangkan untuk anggaran 2020 naik sebesar 800 persen
- Anggaran pembelian belanja pulpen Rp 635 miliar
- Anggaran pembelian kertas Rp 213 miliar
- Anggaran pembelian tinta printer Rp 400 miliar
- Anggaran pembelian stabilo Rp 3 miliar
- Anggaran pembelian penghapus Rp 31 miliar
- Anggaran pembelian kalkulator Rp 31 miliar